

Nama : Muhammad Multazim  
NIM : 220607110060  
Mata Kuliah : Aspek Hukum dalam Informasi  
Dosen Pengampu : Annisa Fajriyah,M.A.

---

### **RUU TNI dan Sunyinya Demokrasi: Kenapa Kita Nggak Dikasih Tahu?**

Beberapa minggu terakhir, ada satu hal penting yang luput dari pembahasan warung kopi, timeline Twitter, bahkan FYP TikTok. Ini bukan tentang harga cabe yang naik, viralnya kucing main ukulele, atau drama selebgram putus-nyambung. Ini soal negara, soal kekuasaan, dan percaya atau nggak ini soal kita semua: Revisi Undang-Undang TNI alias RUU TNI.

Iya, benar. Tanpa diduga-duga, muncul kabar kalau DPR lagi membahas revisi UU TNI. Tapi dibahasnya kayak lagi main petak umpet. Nggak banyak media yang ngeliput, nggak ada forum publik, apalagi transparansi proses. Rakyat? Ya ditinggal ngopi sambil scroll medsos, nggak tahu apa-apa.

Padahal yang dibahas bukan hal remeh kayak jumlah kursi rapat atau warna seragam baru. Ini tentang militer, institusi bersenjata, dan rencana untuk memperluas peran mereka ke ranah sipil. Dan ketika pembahasan hal sebesar itu dilakukan secara diam-diam, ya wajar kalau banyak yang mulai curiga “ada apa ini?”.

Kita sepakat bahwa TNI punya peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kita hormat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk mereka yang jaga perbatasan, lawan ancaman, dan sigap saat bencana. Tapi ketika ada rencana buat bikin peran mereka makin luas termasuk urusan ekonomi strategis, penanggulangan terorisme, bahkan kegiatan non-perang lainnya, maka perlu ada diskusi terbuka. Sebab ini bukan hanya menyangkut institusi militer, tapi juga kehidupan sipil kita semua.

Perlu diingat bahwa selama era Orde Baru, dominasi militer dalam kehidupan sipil bukan hal asing. Kita atau mungkin orang tua kita pernah hidup di zaman di mana peran sipil sering "diambil alih" demi stabilitas versi penguasa. Dan sekarang, ketika ruang sipil makin terhimpit dan wacana pelibatan TNI dalam urusan non-militer kembali muncul, kita patut waspada.

Masalahnya bukan cuma isi RUU-nya, tapi juga caranya. Kenapa revisi undang-undang yang sebesar ini dibahas secara diam-diam? Kenapa nggak ada uji publik? Kenapa nggak ada draft terbuka yang bisa diakses publik? Ini bukan sekadar soal prosedural. Ini soal prinsip.

Kita punya loh, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Isinya tegas yaitu, masyarakat berhak tahu tentang kebijakan publik, terutama yang

menyangkut hajat hidup orang banyak. Proses legislasi harus terbuka. Tapi dalam kasus ini, prosesnya kayak lagi main di lorong gelap. Tanpa kabar, tanpa lampu, tanpa peta.

Dan jangan salah, ini bukan soal rakyat mau ikut campur urusan militer atau nanyanya hal rahasia. Kita ngerti kok, ada informasi yang memang perlu dijaga kerahasiaannya. Tapi soal perluasan peran, perubahan struktur, hingga kewenangan baru yang berpotensi menyentuh langsung kehidupan sipil? Ya masa kita nggak diajak ngobrol dulu?

Transparansi dalam demokrasi bukan ancaman. Justru itu pondasi. Karena tanpa keterbukaan, rakyat cuma jadi objek kebijakan. Demokrasi berubah jadi formalitas belaka, ada pemilu, ada DPR, tapi keputusan diambil tanpa melibatkan suara publik.

Coba bayangkan, kalau besok tentara bisa langsung turun tangan dalam urusan ekonomi atau politik tanpa persetujuan sipil, siapa yang bisa mengawasi? Siapa yang bisa menjamin itu semua nggak disalahgunakan? Sejarah negara-negara lain termasuk kita sendiri sudah cukup banyak kasih pelajaran pahit soal dominasi militer yang nggak dikontrol.

Yang kita tuntut bukan hal aneh-aneh. Cuma satu, transparansi. Buka prosesnya. Undang akademisi, libatkan masyarakat sipil, ajak media. Jangan bikin revisi UU kayak lagi nyiapin *surprise party*. Bedanya, ini bukan kejutan yang lucu. Ini bisa jadi kejutan yang menakutkan kalau dampaknya merugikan kebebasan sipil.

Kalau pemerintah dan DPR beneran serius mau membangun demokrasi yang sehat, ya ayo, buka ruang partisipasi. Jangan asal tekan, asal ketok palu, terus publik disuruh terima. Demokrasi itu seharusnya ribut. Penuh debat, diskusi, dan adu argumen. Kalau proses penting seperti revisi UU TNI aja dikerjakan diam-diam, kita harus mulai nanya "kita ini warga negara, atau cuma penonton di pinggir lapangan?"

Karena pada akhirnya, demokrasi itu bukan sekadar sistem politik. Demokrasi adalah soal rasa percaya. Dan rasa percaya itu tumbuh bukan dari sembunyi-sembunyi, tapi dari keberanian untuk terbuka.